





STIE WIDYA WIWAHA  
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN  
PADA MASYARAKAT

**SURAT TUGAS**

No. 21/LP2M/ST/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Beta Asteria, SE, MM, M.Ec.Dev  
NIP/NIDN : 0503128301  
Jabatan : Ketua LP2M STIE Widya Wiwaha

Dengan ini memberikan tugas kepada:

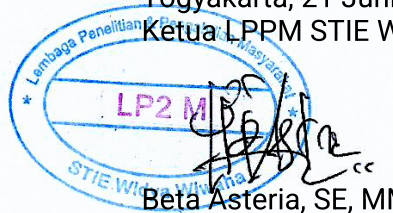
Nama : Dr. Nur Widiastuti, SE, M.Si  
Jabatan : Dosen STIE Widya Wiwaha

Sebagai narasumber pada kegiatan 'FGD Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Bahan Masukkan Penyusunan Dokumen RPJPP Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045' pada:

Tanggal : 23 Juni 2023  
Jam : 08.30 s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kananti Bappeda Kabupaten Sleman

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 21 Juni 2023  
Ketua LPPM STIE Widya Wiwaha



Beta Asteria, SE, MM, M.Ec.Dev

# ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Masukan Penyusunan RPJPD  
Kabupaten Sleman 2025-2045  
Rapat , 23 Juni 2023

# Permasalahan

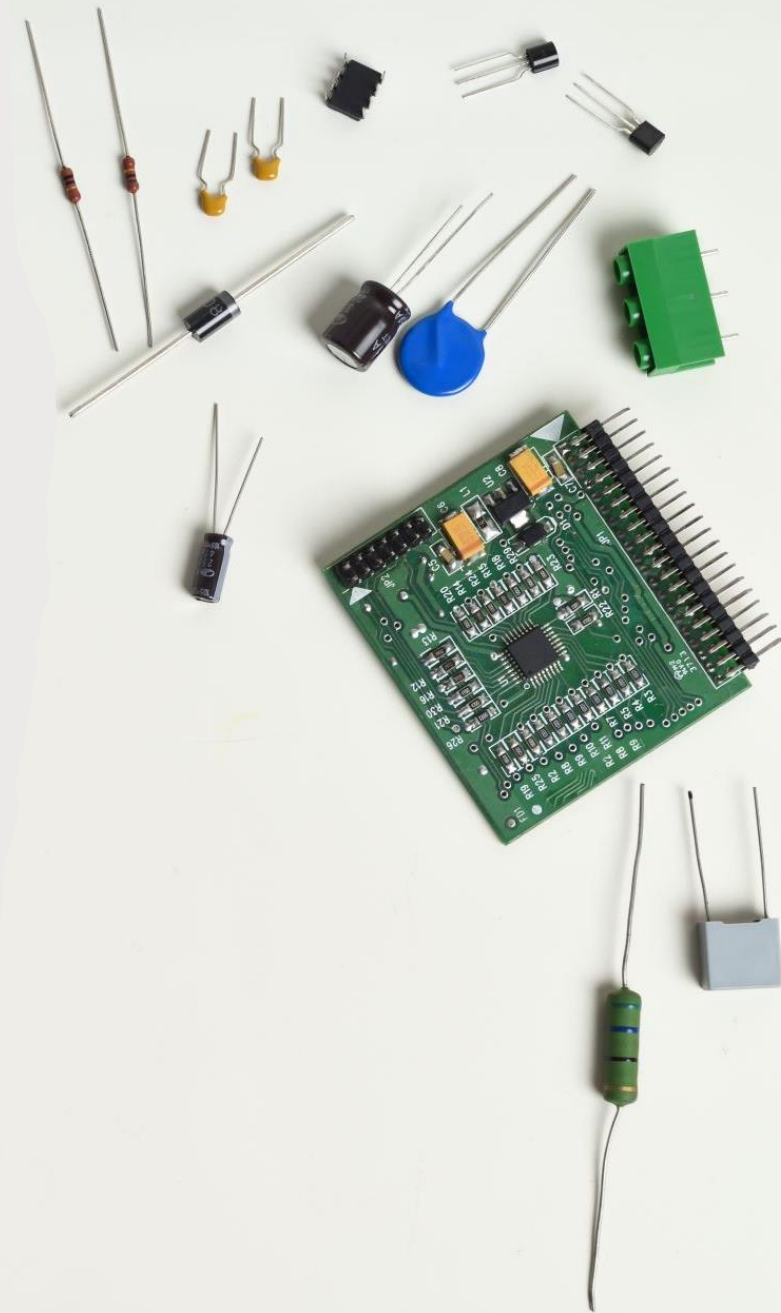
## Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Terdapat 23 Kalurahan yang belum memiliki BUMKAL.
2. Pengelolaan BUMKAL belum berjalan dengan baik. Dari 63 BUMKAL yang terbentuk, 7 BUMKAL berbadan hukum dan 3 BUMKAL dengan kategori maju.
3. Berdasarkan pemeringkatan Indeks Desa Membangun baru 44 Desa (51,16%) yang berpredikat mandiri sedangkan sisanya 40 Desa berpredikat Maju dan 2 Desa berpredikat Berkembang.
4. Pengelolaan Sistem Informasi Desa belum optimal
5. Pengelolaan Pasar Desa belum berjalan dengan baik, dari 35 Pasar Desa baru 48,57% yang berpredikat baik.
6. Pemanfaatan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) oleh Perangkat Daerah guna mendukung aksi program yang ditetapkan masih belum optimal.
7. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa belum optimal
8. Siklus tahunan desa belum berjalan tepat waktu, Jumlah Desa yang Melaksanakan Siklus Tahunan Tepat Waktu baru 50%.
9. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong belum tepat sasaran
10. Kompetensi aparatur kalurahan dalam memahami ketugasan belum optimal.
11. Regenerasi kader belum berjalan dengan baik



# Isu Eksternal

1. Tantangan globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's).
2. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai masifnya penggunaan mobile internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, dan Internet of Things (IoT) menjadi pemicu bagi setiap instansi pemerintah untuk melakukan transformasi digital. Layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat menjadi trend pelayanan yang harus disiapkan.
3. Reformasi Kalurahan meliputi Reformasi Birokrasi Kalurahan, Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Reformasi yang bersifat tematik.



# Isu Strategis

## Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Terdapat 23 Kalurahan yang belum memiliki BUMKal.
2. Pengelolaan BUMKal belum berjalan dengan baik. Dari 63 BUMKal yang terbentuk, 7 BUMKal berbadan hukum dan 3 BUMKal dengan katagori maju.
3. Berdasarkan pemeringkatan Indeks Desa Membangun baru 44 Desa (51,16%) yang berpredikat mandiri sedangkan sisanya 40 Desa berpredikat Maju dan 2 Desa berpredikat Berkembang.
4. Pengelolaan Sistem Informasi Desa belum optimal
5. Pengelolaan Pasar Desa belum berjalan dengan baik, dari 35 Pasar Desa baru 48,57% yang berpredikat baik.
6. Pemanfaatan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) oleh Perangkat Daerah guna mendukung aksi program yang ditetapkan masih belum optimal.
7. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa belum optimal
8. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong belum berjalan dengan baik
9. Kompetensi aparatur kelurahan pamong dalam memahami ketugasan belum optimal.
10. Regenerasi kader belum berjalan dengan baik

# Tahapan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman 2025-2045

## Periode I (2025-2030)

Membangun kemandirian dan keberkelanjutan kalurahan melalui penguatan kompetensi aparatur kalurahan, tata kelola pemerintahan kalurahan, daya saing dan peran serta masyarakat.

## Periode II (2031 -2035)

Menguatkan kemandirian dan keberkelanjutan kalurahan melalui penguatan kompetensi aparatur kalurahan, tata kelola pemerintahan kalurahan, daya saing dan peran serta masyarakat berbasis **teknologi informasi dan komunikasi**.

## Periode III (2036 – 2040)

Meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan kalurahan melalui peningkatan kompetensi aparatur kalurahan, tata kelola pemerintahan kalurahan, daya saing dan peran serta masyarakat berbasis **teknologi informasi dan komunikasi**.

## Periode IV (2041 – 2045)

Memantapkan kemandirian dan keberlanjutan kalurahan melalui pemantapan kompetensi aparatur kalurahan, tata kelola pemerintahan kalurahan, daya saing dan peran serta masyarakat berbasis **teknologi informasi dan komunikasi**.

# Arah Kebijakan Pembangunan Dan Sasaran Pokok

Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Pembangunan	Keterangan
<p><i>Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode I: Membangun kemandirian dan keberkelanjutan kalurahan melalui penguatan kompetensi aparatur kalurahan, tata kelola pemerintahan kalurahan, daya saing dan peran serta masyarakat.</i></p>			
<p><i>Menguatkan Kompetensi Aparatur Kalurahan, tatakelola pemerintahan kalurahan, daya saing dan peran serta masyarakat.</i></p>	<p><i>Jumlah Kalurahan dengan status mandiri</i></p>	<p>86</p>	
	<p><i>Jumlah BumKal dengan klasifikasi maju</i></p>	<p>12</p>	
<p><i>Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode II: Menguatkan kemandirian dan keberkelanjutan kalurahan melalui penguatan kompetensi aparatur kalurahan, tata kelola pemerintahan kalurahan, daya saing dan peran serta masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</i></p>			
<p><i>Menguatkan Kompetensi Aparatur Kalurahan, tatakelola pemerintahan kalurahan, daya saing dan peran serta masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</i></p>	<p><i>Jumlah kalurahan dengan status mandiri</i></p>	<p>86</p>	
	<p><i>Jumlah BumKal dengan klasifikasi maju</i></p>	<p>15</p>	



# Arah Kebijakan Pembangunan Dan Sasaran Pokok

<i>Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok</i>	<i>Indikator</i>	<i>Target Kinerja Pembangunan</i>	<i>Keterangan</i>
<p><b><i>Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode III : Meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan kalurahan melalui peningkatan kompetensi aparatur kalurahan, tata kelola pemerintahan kalurahan, daya saing dan peran serta masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</i></b></p>			
<p><i>Meningkatkan Kompetensi Aparatur Kalurahan, tatakelola pemerintahan kalurahan, daya saing dan peran serta masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</i></p>	<p><i>Jumlah kalurahan dengan status mandiri</i></p>	<p>86</p>	
	<p><i>Jumlah BumKal dengan klasifikasi maju.</i></p>	<p>18</p>	
<p><b><i>Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode IV : Memantapkan kemandirian dan keberlanjutan kalurahan melalui pemantapan kompetensi aparatur kalurahan, tata kelola pemerintahan kalurahan, daya saing dan peran serta masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</i></b></p>			
<p><i>Memantapkan kompetensi aparatur kalurahan, tatakelola pemerintahan kalurahan, daya saing dan peran serta masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</i></p>	<p><i>Jumlah kalurahan dengan status mandiri</i></p>	<p>86</p>	
	<p><i>Jumlah BumKal dengan klasifikasi maju</i></p>	<p>23</p>	

## Target Kinerja Periode 1

*Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode I: Membangun kemandiri dan keberkelanjutan kalurahan melalui penguatan kompetensi aparatur kalurahan, tata kelola pemerintahan kalurahan, daya saing dan peran serta masyarakat.*

Arah Pembangunan Dan Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Tahap 1					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Menguatkan Kompetensi Aparatur Kalurahan, tatakelola pemerintahan kalurahan, daya saing dan peran serta masyarakat.</i>	<i>Jumlah Kalurahan dengan status mandiri</i>	48	54	62	70	78	86
	<i>Jumlah BumKal dengan klasifikasi maju</i>	5	6	7	8	10	12



# SERTIFIKAT

Nomor : 896 / 800 / EKO / VI / 2023

DIBERIKAN KEPADA :

**Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.**

Sebagai Narasumber *Focus Group Discussion* (FGD) Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebagai Bahan Masukan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 pada tanggal 23 Juni 2023, yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.

Sleman, 28 Juli 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



**DWI ASTA SUDIBYA, MT**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19680715 199303 1 004